



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 96/M.PPN/HK/06/2022
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai pencipta arsip perlu membuat sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip untuk mendukung terwujudnya pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien;
- d. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

PERTAMA : ...

- PERTAMA : Menetapkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertujuan untuk:
- a. menyediakan layanan informasi Arsip Dinamis kepada Publik dengan prinsip cepat, tepat, murah, dan aman;
 - b. menyediakan informasi yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses oleh Publik; dan
 - c. menjamin keamanan Arsip bagi Informasi yang dikecualikan.
- KETIGA : Arsip Dinamis di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dapat diakses oleh Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal.
- KEEMPAT : Ketentuan Akses terhadap Arsip sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Pengamanan Arsip Dinamis didukung dengan sarana dan prasarana meliputi perangkat keras dan perangkat lunak dikoordinasikan oleh Unit Kearsipan.
- KEENAM : Ketentuan tentang Pengamanan Arsip Dinamis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUH : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berwenang mengakses seluruh Arsip yang berada di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEDELAPAN : Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas:
- a. fasilitatif; dan
 - b. substantif.
- KESEMBILAN : Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPATBELAS tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 96/M.PPN/HK/06/2022
TANGGAL 30 JUNI 2022

KETENTUAN AKSES TERHADAP ARSIP DAN
KETENTUAN PENGAMANAN ARSIP DINAMIS

A. KETENTUAN AKSES TERHADAP ARSIP

1. Pengguna Internal meliputi:
 - a. Menteri;
 - b. Sekretaris Kementerian, Inspektur Utama, Deputi, Staf Ahli Menteri, dan Staf Khusus Menteri;
 - c. Direktorat, Kepala Biro, Kepala Pusat, dan Inspektur;
 - d. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana, dan staf; dan
 - e. Pengawas Internal.
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c, berwenang mengakses Arsip yang terdapat pada Unit Pengolah/Unit Kerja di bawah kewenangannya dan tidak dapat mengakses Arsip yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan yang satu level dengan unit di luar unit kerjanya.
3. Pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat mengakses Arsip yang berada di luar kewenangannya, setelah mendapatkan izin dari pejabat pada Unit Pengolah/Unit Kerja yang bersangkutan.
4. Pejabat dan staf sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d berwenang mengakses seluruh Arsip yang berada pada tanggung jawab, tugas dan kewenangannya, dengan tingkat klasifikasi Biasa/Terbuka.
5. Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e berwenang mengakses seluruh Arsip di Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengguna Eksternal meliputi:
 - a. Pengawas eksternal;
 - b. Aparat Penegak Hukum; dan
 - c. Publik.
7. Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a berwenang mengakses seluruh Arsip di Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b berwenang mengakses Arsip di Kementerian PPN/Bappenas yang terkait

dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum.

9. Publik sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf c dapat mengakses Arsip di Kementerian PPN/Bappenas yang dikategorikan Biasa/Terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. KETENTUAN PENGAMANAN ARSIP DINAMIS

1. Pelaksanaan Pengamanan Arsip Dinamis dilakukan dengan berkoordinasi dengan Unit Pengolah/Unit Kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan barang milik negara.
2. Pengamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh Pejabat Fungsional Arsiparis di Unit Pengolah/Unit Kerja dan di Unit Kearsipan.
3. Pejabat Fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud pada angka 2 berwenang dan bertugas melakukan pengamanan terhadap Arsip Aktif di Sentral Arsip Aktif dan Arsip Inaktif di Sentral Arsip Inaktif Kementerian PPN/Bappenas.
4. Dalam hal belum tersedia Pejabat Fungsional Arsiparis di Unit Pengolah/Unit Kerja dan Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menugaskan staf lain untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 3 sebagai pengelola Arsip.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 96/M.PPN/HK/06/2022
TANGGAL 30 JUNI 2022

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

A. FASILITATIF

KODE KLASIFIKASI	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
DI	I	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI					
DI.01	1	Rencana Induk/ <i>master plan</i> Pembangunan Sistem Informasi (SI)	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
DI.02	2	Dokumentasi Arsitektur dan implementasi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan dan Unit Kerja Eselon II yang Mampu Sistem
		- Sistem Informasi					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
		- Sistem Aplikasi					
		- Infrastruktur					
DI.03	3	Perekaman dan Pemutakhiran Data	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
		- Formulir isian					
		- Daftar petugas perekaman					
		- Jadwal pelaksanaan					
		- Laporan hasil perekaman dan pemutakhiran data					
DI.04	4	Migrasi Sistem Aplikasi dan Data	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
		- Perencanaan migrasi					
		- Pelaksanaan migrasi					
		- Berita Acara kegiatan migrasi					
		- Daftar sistem aplikasi dan data yang dimigrasi					
		- Laporan hasil migrasi					
DI.05	5	Dokumen hosting	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
		- Formulir permintaan hosting					
		- Laporan hasil uji kelayakan					
		- Laporan pelaksanaan hosting					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
DI.06	6	Layanan <i>Back Up</i> Data Digital	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
DI.07	7	Pengelolaan Data, Informasi dan Pengetahuan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
DI.08	8	Penyajian Data, Informasi dan Pengetahuan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
DI.09	9	Pemeliharaan Sistem Informasi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
DI.10	10	Prasarana Teknologi Informasi	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
DI.11	11	Monitoring dan Evaluasi SPBE	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
DL	II	PENDIDIKAN & PELATIHAN DAN PEMBINAAN SDM PERENCANA					
DL.01	1	Perencanaan dan Pengembangan Program					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
DL.01.01		a. Pedoman / Panduan	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana
DL.01.02		b. Kurikulum Diklat	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana
DL.01.03		c. Modul / Bahan Ajar Diklat	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana
DL.01.04		d. Panduan Fasilitator/ Panduan Karyasiswa	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana
DL.01.05		f. Kalender Diklat Tahunan	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana
DL.01.06		g. Sosialisasi / Konsultasi Kebijakan Pengembangan SDM	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana
DL.01.07		h. Pengembangan Program	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
		- Laporan pengembangan program dan kajian					
DL.02	2	Penyelenggaraan Pendidikan					
DL.02.01		a. Seleksi Program Pendidikan	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana
		- Surat Penawaran Program Pendidikan					
		- Surat Pemanggilan Tes TPA / TOEFL					
		- Peserta TPA / TOEFL					
		- Surat Permintaan Bahan TPA / TOEFL					
		- ND Permintaan Pembayaran					
		- Surat Pemanggilan Peserta Penempatan					
		- Rapat-rapat Koordinasi Seleksi					
		- Notula Rapat					
		- Laporan Seleksi Program Pendidikan					
DL.02.02		b. Pelaksanaan Program Pendidikan	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana
		- Surat / ND terkait dengan Pelaksanaan Program					
		- Berita Serah Terima Karya Siswa					
		- Nota Persetujuan					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
		- Surat Pemberitahuan Pembiayaan Program Pendidikan					
		- Surat Rekomendasi					
		- Surat Jaminan Biaya Pendidikan					
		- Surat Keterangan Pembiayaan					
		- Surat Penundaan Pembayaran					
		- Surat Perkembangan Studi Karyasiswa					
		- Surat Perpanjangan Masa Studi					
		- Surat Pengembalian Karyasiswa dan Pengembalian ke Instansi Asal					
		- Statement of Financial Sponsorship					
		- Nota Dinas Pencairan Tunjangan Biaya Hidup/Tunjangan Tesis/Disertasi/Publikasi					
		- Surat <i>Notice to Proceed</i>					
		- Rapat Koordinasi					
		- Notula Rapat Koordinasi					
		- Statistik Karya Siswa					
		- Laporan Penyelenggaraan Program					
DL.02.03		c. Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Program Pendidikan	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana
DL.03	3	Penyelenggaraan Pelatihan					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
DL.03.01		a. Seleksi Program Pelatihan	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana
DL.03.02		b. Pelaksanaan Program Pelatihan	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana
DL.03.03		c. Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Program Pelatihan	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana
DL.04	4	Data Penyelenggaraan Diklat					
DL.04.01		a. Data Penyelenggara Kerja Sama Diklat	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana
DL.04.02		b. Data Peserta/ Alumni Diklat	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana
DL.04.03		c. Data Widyaiswara	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
DL.05	5	Akreditasi Lembaga Diklat	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana
		- Surat Permohonan Akreditasi					
		- Laporan Hasil Verifikasi Lapangan					
		- Berita Acara Rapat Verifikasi					
		- Berita Acara Rapat Tim Penilaian					
		- Surat Keputusan Penetapan Akreditasi					
		- Sertifikat Akreditasi					
DL.06	6	Pembinaan SDM Perencana					
DL.06.01		a. Sertifikasi Sumber Daya Manusia	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana
		- Surat Permohonan Sertifikat					
		- Laporan Hasil Verifikasi Lapangan					
		- Berita Acara Rapat Verifikasi					
		- Berita Acara Rapat Tim Penilaian					
		- Surat Keputusan Penetapan Sertifikasi					
		- Sertifikat Sertifikasi					
DL.06.02		b. Penilaian Angka Kredit Perencana	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
		- Daftar Usul Penetapan Angka Kredit beserta Data Dukungnya					
		- Notulen Rapat Tim Penilai					
		- Penetapan Angka Kredit					
DL.06.03		c. Data Pejabat Fungsional Perencana	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana
DL 06.04		d. Pembinaan Fungsional Perencana	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana
		- Usulan Formasi					
		- Rekomendasi diklat					
		- Rapat Koordinasi Fungsional Perencana					
		- Pembahasan soal test materi					
		- Soal test CPNS Perencana					
		- Data-data terkait pembinaan fungsional Perencana					
HK	III	H U K U M					
HK.01	1	Program Legislasi					
HK.01.01		a. Bahan/ Materi Program Legislasi Nasional	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hukum

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
HK.01.02		b. Program Legislasi Kementerian	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hukum
		- Inventarisir Peraturan					
		- Undangan					
		- Daftar Hadir					
		- Laporan					
HK.02	2	Produk Hukum					
HK.02.01		a. Produk Hukum yang bersifat Pengaturan	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hukum
		- Peraturan Menteri					
		- Instruksi Menteri					
		- Surat Edaran, dll					
HK.02.02		b. Produk Hukum yang bersifat Penetapan	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hukum
		- Keputusan Menteri					
		- Keputusan Eselon I					
HK.03	3	Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan (NSPK)	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hukum
		- naskah akademik,					
		- penyusunan draf awal,					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
		- penyusunan draf akhir,					
		- Penetapan pedoman/ standar/ juklak/ juknis dan protap					
HK.04	4	Dokumentasi dan Informasi Hukum	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hukum
		- Undang-Undang					
		- Peraturan Pemerintah					
		- Peraturan Presiden					
		- Keputusan Presiden					
		- Peraturan-peraturan lain yang dijadikan referensi					
HK.05	5	Perjanjian Kerja Sama/ MoU/ Kontrak/ Nota Kesepahaman					
HK.05.01		a. Perjanjian Kerjasama/MoU/Kontrak/Nota Kesepahaman Dalam Negeri	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hukum
		- Telaah/kajian/evaluasi dan pertimbangan hukum					
		- Risalah pembuatan MoU					
		- Rancangan/draft awal					
		- Rancangan/draft akhir					
		- Memori Perjanjian,					
		- Naskah asli yang ditandatangani					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
HK.05.02		b. Perjanjian Kerjasama/MoU/Kontrak/Nota Kesepahaman Luar Negeri	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hukum
		- Telaah/kajian/evaluasi dan pertimbangan hukum					
		- Risalah pembuatan MoU					
		- Rancangan/draft awal					
		- Rancangan/draft akhir					
		- Memori Perjanjian,					
		- Naskah asli yang ditandatangani					
HK.06	6	Sosialisasi, Penyebarluasan Informasi dan Pembinaan Hukum	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hukum
HK.07	7	Bantuan/ Konsultasi Hukum/ Advokasi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hukum
HK.08	8	Kasus/ Sengketa Hukum	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hukum
HK.09	9	Telaah Hukum/ <i>Judicial Review</i> Peraturan Perundang-undangan	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hukum
		- Panggilan Sidang					
		- Surat Kuasa					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
HK.10	10	Perizinan	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hukum
HK.11	11	Hak atas Kekayaan Intelektual					
HK.11.01		a. Hak Cipta	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hukum
HK.11.02		b. Hak Paten	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hukum
HK.11.03		c. Permohonan HaKI yang di tolak	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hukum
HM	IV	HUBUNGAN MASYARAKAT					
HM.01	1	Keprotokolan					
HM.01.01		a. Penyelenggaraan acara kedinasan	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
HM.01.02		b. Penerimaan Tamu	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
		- Buku Tamu					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
HM.01.03		c. Agenda kegiatan pimpinan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
HM.01.04		d. Daftar nama/ alamat kantor/ profil pimpinan / pejabat	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
HM.02	2	Kunjungan Dinas/ Kunjungan Kerja					
HM.02.01		a. Kunjungan dinas Presiden/ Menteri/ Pimpinan Lembaga / pejabat Eselon I	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
HM.02.02		b. Kunjungan Dinas Pejabat Lain/ Pegawai	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
HM.03	3	Layanan Informasi Publik (PPID)	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
		- Prosedur layanan informai publik,					
		- Laporan layanan informasi publik, dan					
		- Aspirasi publik					
HM.04	4	Dokumentasi/Liputan					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
HM.04.01		a. Liputan Menteri PPN/Kepala Bappenas	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
HM.04.02		b. Liputan Pejabat Tinggi Madya (Eselon I)	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
HM.04.03		c. Liputan Pejabat lain/pegawai	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
HM.05	5	Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan					
HM.05.01		a. Kliping Koran	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
HM.05.02		b. Brosur/ Leaflet/ Poster/ Plakat	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
HM.05.03		c. Pengumuman/ Pemberitaan	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
HM.06	6	Hubungan antar Lembaga Negara dan Badan Pemerintah/ Instansi					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
HM.06.01		a. Hubungan antar Lembaga Pemerintah	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
HM.06.02		b. Hubungan dengan Organisasi Sosial/ LSM	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
HM.06.03		c. Hubungan dengan Perusahaan	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
HM.06.04		d. Hubungan dengan Perguruan Tinggi/ Sekolah	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
		- Permohonan Magang					
		- Permohonan Pendidikan Sistem Ganda (PSG/ Praktek Kerja Lapangan (PKL)					
		- Hasil Nilai Magang/ Pendidikan Sistem Ganda (PSG/ Praktek Kerja Lapangan (PKL)					
HM.06.05		e. Forum Kehumasan (Bakohumas/ Perhumas)	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
HM.06.06		f. Hubungan dengan Media Massa	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
		- Siaran pers/ konferensi pers/ press release					
		- Laporan Kunjungan wartawan/ peliputan					
		- Hasil Wawancara					
HM.07	7	Dokumen Persidangan dan Bahan Rapat					
HM.07.01		a. Bahan Sidang Kabinet	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
HM.07.02		b. RDP DPR/DPD RI	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
HM.07.03		c. Rapat Koordinasi Tingkat Kementerian	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
HM.07.04		d. Bahan Rapat Terbatas Kementerian	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
HM.07.05		e. Pidato Menteri PPN/ Kepala Bappenas	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
HM.08	8	Penerbitan dan Publikasi Majalah, Buletin, Koran dan Jurnal	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
HM.09	9	Pameran/ Sayembara/ Lomba/ Festival/ Pembuatan Spanduk dan Iklan	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
HM.10	10	Penghargaan/ Tanda Kenang-kenangan	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
HM.11	11	Ucapan Terima Kasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, dan Permohonan Maaf	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
KA	V	KEARSIPAN					
KA.01	1	Pengelolaan Persuratan					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
KA.01.01		a. Pengurusan Surat Masuk	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
		- Buku agenda					
		- Lembar pengantar/buku ekspedisi					
		- Formulir/catatan permintaan dan layanan penggandaan dokumen/Arsip					
KA.01.02		b. Pengurusan Surat Keluar	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
		- Administasi Pengiriman surat					
		- Tanda Terima					
KA.02	2	Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip					
KA.02.01		a. Pemberkasan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
		- Daftar Arsip (daftar berkas dan daftar isi berkas)					
		- Formulir Peminjaman Arsip,					
		- Buku Catatan Peminjaman Arsip, dll.					
KA.02.02		b. Penataan Arsip	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
		- Daftar Arsip Inaktif					
		- Formulir Peminjaman Arsip Inaktif,					
		- Buku Catatan Peminjaman Arsip Inaktif, dll.					
KA.02.03		c. Penyimpanan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
		- Skema Penataan Arsip					
		- Peta Lokasi Penyimpanan Arsip					
		- Cheklist pengaturan suhu dan temperatur ruang penyimpanan					
		- Pemeliharaan Arsip dan ruang penyimpanan (seperti kegiatan fumigasi)					
KA.02.04		d. Alih Media Arsip	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
		- Berita acara Alih Media Arsip					
		- Daftar Arsip yang dialih mediakan					
KA.02.05		e. Akses Penggunaan Arsip	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
		- Buku peminjaman Arsip					
		- Formulir Peminjaman					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
KA.03	3	Pengelolaan Arsip Vital dan Arsip Terjaga	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
		- Daftar Arsip vital					
		- Daftar Arsip terjaga, Laporan Daftar Arsip Terjaga Ke Arsip Nasional					
		- Berita acara penyerahan salinan Arsip terjaga					
KA.04	4	Penyusutan Arsip					
KA.04.01		a. Pemindahan Arsip Inaktif	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
		- Berita Acara Pemindahan Arsip					
		- Daftar Arsip Yang Dipindahkan					
KA.04.02		b. Pemusnahan Arsip	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
		- SK Tim Pemusnahan,					
		- Surat usulan pemusnahan,					
		- Rekomendasi/Pertimbangan/Persetujuan Pemusnahan dari Kepala ANRI,					
		- Surat Keputusan Pemusnahan					
		- Berita Acara Pemusnahan					
		- Daftar Arsip Musnah					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
KA.04.03		c. Penyerahan Arsip statis	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
		- Surat Usulan Penyerahan Arsip Statis,					
		- Rekomendasi/Pertimbangan/Persetujuan Penyerahan Arsip					
		- Berita Acara Penyerahan Arsip Statis					
		- Daftar Arsip Serah					
KA.05	5	Pembuatan NSPK Kearsipan	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
KA.06	6	Pembinaan kearsipan	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
		- Apresiasi/ sosialisasi/ penyuluhan kearsipan/ lokakarya/ workshop					
		- Bimbingan teknis					
		- Supervisi/ Pengawasan kearsipan					
KA. 07	7	Pengembangan Simpul Jaringan Kearsipan	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
KP	VI	KEPEGAWAIAN					
KP.01	1	Formasi Pegawai					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
KP.01.01		a. Usulan dari Unit Kerja	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
		- hasil analisis jabatan					
		- hasil analisis beban kerja					
KP.01.02		b. Usulan Permintaan Formasi ke Menpan dan RB	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
		- Surat permintaan persetujuan formasi pada Menpan dan RB					
KP.01.03		c. Persetujuan Formasi dari Menpan	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
		- Surat persetujuan formasi dari Menpan					
KP.01.04		d. Penetapan Formasi	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
		- SK penetapan formasi					
KP.01.05		e. Penetapan Formasi Khusus	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
		- SK penetapan formasi khusus					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
KP.02	2	Pengadaan ASN PNS					
KP.02.01		a. Proses Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
		- Pengumuman melalui media cetak maupun elektronik,					
		- Seleksi administrasi,					
		- Pemanggilan peserta test,					
		- Pelaksanaan ujian tertulis,					
		- Hasi Test Kesehatan					
		- Keputusan hasil ujian,					
		- Wawancara					
		- Keputusan kelulusan					
KP.02.02		b. Penetapan Pengumuman Kelulusan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
KP.02.03		c. Berkas Lamaran yang tidak diterima	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
KP.02.04		d. Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak terkait privasi seseorang	Biro Sumber Daya Manusia
		- Surat lamaran					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
		- ijazah					
		- SKCK					
		- Kartu Kuning					
		- Surat Keterangan dokter					
		- dll (disesuaikan)					
KP.02.05		e. Nota usul dan pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih 2 Tahun	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
KP.02.06		f. SK CPNS/PNS Kolektif	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
KP.03	3	Pengadaan ASN P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)/ Pegawai Kontrak					
KP.03.01		a. Proses Penerimaan ASN P3K	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
		- pengumuman penerimaan ASN/P3K,					
		- seleksi administrasi,					
		- pemanggilan peserta test,					
		- pelaksanaan ujian tertulis,					
		- Hasil test Kesehatan					
		- kemampuan bidang,					
		- keputusan hasil ujian,					
		- wawancara					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
KP.03.02		b. Penetapan Pengumuman Kelulusan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
KP.03.03		c. Pengangkatan ASN P3K	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
		- Surat lamaran					
		- ijazah					
		- SKCK					
		- Kartu Kuning					
		- Surat Keterangan dokter					
		- dll (d disesuaikan)					
KP.03.04		d. Berkas Lamaran yang tidak diterima	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
KP.03.05		e. SK / Perjanjian Kerja	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
KP.04	4	Pengadaan Pegawai Non ASN/ PPNN	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
		- Berkas Lamaran					
		- SK Penetapan					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
KP.05	5	Pengadaan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama					
KP.05.01		a. Proses Penerimaan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
		- Pengumuman					
		- Seleksi administrasi					
		- Pemanggilan Peserta test					
		- pelaksanaan ujian tertulis					
		- assesment center					
		- kompetensi bidang					
		- keputusan hasil ujian dan wawancara					
KP.05.02		b. Penetapan Pengumuman Kelulusan	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
		- Penetapan Pengumuman kelulusan					
KP.05.03		c. Usul Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
KP.05.04		d. Nota usul ke Presiden	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
KP.05.05		e. Berkas Lamaran yang tidak diterima	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
KP.06	6	Pengembangan Karir Pegawai					
KP.06.01		a. Perencanaan Pengembangan Pegawai	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
		- Penyusunan Dokumen HCDP					
		- Rapat Koordinasi					
KP.06.02		b. Tugas belajar/ijin belajar	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
		- Edaran/pengumuman berkenaan dengan studi lanjut,					
		- surat menyurat permohonan dari pegawai dan atau usulan studi,					
		- laporan hasil tes masuk yang dituju,					
		- ikatan kerja dan surat perjanjian ijin/tugas belajar,					
		- surat perintah/tugas belajar/sk/surat ijin,					
		- Laporan perkembangan Studi					
		- Ijazah					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
		- Akreditasi program studi					
		- STTPL					
		- Sertifikat					
KP.06.03		c. Diklat Teknis/ Kursus	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
KP.06.04		d. Ujian Dinas/ Ujian kenaikan pangkat/Uji Kompetensi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
KP.06.05		e. Assement test pegawai	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
KP.06.06		f. Pemetaan Kompetensi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
KP.07	7	Pembinaan Pegawai					
KP.07.01		a. Penilaian Kinerja	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
		- SKP					
		- Penilaian Prestasi Kerja					
		- Tim Penilai Kinerja					
KP.07.02		b. Pakta Integritas/ Kesetiaan pada Ideologi Pancasila	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
KP.07.03		c. Disiplin Pegawai	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
		- Daftar hadir dan rekapitulasi kehadiran					
KP.07.04		d. Hukuman disiplin	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
		- Surat Pemanggilan					
		- Surat Peringatan					
		- Berita Acara Pemeriksaan					
		- Pernyataan Tidak Puas					
		- SK Pemberian hukuman disiplin					
		- Permohonan Banding					
		- SK Ketetapan banding					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
KP.07.05		e. Penghargaan dan tanda jasa / Satya Lencana Karya Satya (10, 20, 30)	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
		- Administrasi					
		- SK Penetapan					
		- Sertifikat/ Piagam					
KP.08	8	Pengelolaan Jabatan Fungsional					
KP.08.01		a. Pengelolaan Jabatan Fungsional Perencana	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
		- DUPAK					
		- PAK					
		- Usul Inpassing					
		- Laporan Sosialisasi Jabatan Perencana					
		- Hasil Uji Kompetensi					
KP.08.02		b. Pengelolaan Jabatan Fungsional Tertentu/ Lainnya	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
		- DUPAK					
		- PAK					
		- SK Tim Penilai dan Sekretariat Tim PAK					
		- Berita Acara Penilaian Angka Kredit					
		- Usul Inpassing					
		- SK Pengangkatan					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
		- Kelengkapan Administrasi					
		- Laporan Sosialisasi Jabatan Fungsional Tertentu					
		- Hasil uji Kompetensi					
KP.09	9	Mutasi Pegawai					
KP.09.01		a. Alih status, pindah instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan sementara (Plt/Plh), Mutasi antar unit kerja	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
		- Surat Permohonan					
		- Surat Alih Tugas/Perpindahan					
		- Surat Keputusan					
		- Surat Tugas					
		- Nota persetujuan/ pertimbangan BKN					
KP.09.02		b. Mutasi keluarga	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
		- Surat Izin Pernikahan/Perceraian					
		- Surat Penolakan Izin					
		- Akta Nikah /Cerai					
		- Akte Kelahiran Anak					
		- Surat Keterangan Adopsi Anak					
		- Surat Keterangan Meninggal dunia					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
KP.09.03		c. Usul kenaikan pangkat/Golongan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
		- Nota Usul Kenaikan Pangkat/ Golongan					
		- Sertifikat lulus uji kompetensi					
		- SK Kenaikan Pangkat/golongan					
LP.09.04		d. Kenaikan Gaji Berkala	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
		- Usulan					
		- Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala					
KP.09.05		e. Usul pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
		- Usulan dan SK Kenaikan Jabatan					
		- Usulan dan SK Pengangkatan Jabatan					
		- Usulan dan SK pemberhentian Jabatan					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
KP.09.06		f. Usul penetapan perubahan data dasar/status/kedudukan hukum pegawai	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
		- Usulan					
		- Nota persetujuan					
		- SK					
		- Surat Persetujuan					
KP.09.07		g. Peninjauan masa kerja	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
		- Usulan					
		- Nota persetujuan					
		- SK					
		- Surat Persetujuan					
KP.10	10	Cuti Pegawai					
KP.10.01		a. Cuti besar	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
		- Surat Permohonan Cuti					
		- Surat Cuti					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
KP.10.02		b. Cuti bersalin	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
		- Surat Permohonan Cuti					
		- Surat Cuti					
KP.10.03		c. Cuti Tahunan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
		- Surat Permohonan Cuti					
		- Surat Cuti					
KP.10.04		d. Cuti sakit	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
		- Surat Permohonan Cuti					
		- Surat Cuti					
KP.10.05		e. Cuti alasan penting	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
		- Surat Permohonan Cuti					
		- Surat Cuti					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
KP.10.06		f. Cuti Diluar Tanggungan Negara (CTLN)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
		- Surat Permohonan Cuti					
		- Surat Cuti					
KP.11	11	Identitas pegawai					
KP.11.01		a. Dokumentasi identitas pegawai:	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
		- Usul penetapan Karpeg/KPE/Karis/Karsu					
		- LHKASN (Laporan Harta Kekayaan ASN)/LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) termasuk Pemantauan kepatuhan Penyampaian laporan					
		- Keanggotaan organisasi profesi/kedinasan					
		- Taspen					
		- KP4					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
KP.11.02		b. Daftar Urut kepangkatan (DUK)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
KP.12	12	Kesejahteraan Pegawai					
KP.12.01		a. Layanan pemeliharaan kesehatan pegawai	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
		- Administrasi Layanan Poliklinik					
		- Rekam Medis					
		- Kartu Anggota					
		- Surat Keterangan Sehat					
		- Surat Keterangan Sakit					
KP.12.02		b. BPJS Kesehatan/ BPJS Ketenagakerjaan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
		- Administrasi Pengurusan					
KP.12.03		c. Bantuan Sosial	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
		- Belasungkawa					
		- Musibah					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
KP.12.04		d. Rekreasi, Olah Raga, Kesenian	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
		- Penetapan Anggaran					
		- Administrasi					
		- Laporan pertanggungjawaban					
KP.13	13	Perselisihan/Sengketa kepegawaian	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
		- Pengaduan					
		- Laporan					
		- Notula					
		- Berita Acara Pemeriksaan					
		- SK					
KP.14	14	Pemberhentian pegawai					
KP.14.01		a. Pemberhentian dengan hormat/tidak hormat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
		- Permohonan Pemberhentian atas permintaan sendiri					
		- Usulan pemberhentian pegawai					
		- Penetapan pemberhentian pegawai					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
KP.14.02		b. Pemberhentian PNS yang tewas/ Pengurusan Pensiun Janda/Duda	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
KP.14.03		c. Pemberhentian karena pensiun	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Sumber Daya Manusia
KP.15	15	Berkas Perseorangan					
KP.15.01		a. Berkas Perseorangan Pegawai ASN PNS	Rahasia	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Sumber Daya Manusia
		- Berkas lamaran yang diterima					
		- Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya					
		- Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN					
		- SK Pengangkatan CPNS					
		- Hasil Pengujian Kesehatan					
		- SK Pengangkatan PNS/ASN					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
		- SK Peninjauan Masa Kerja					
		- SK Kenaikkan Pangkat					
		- Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan					
		- Surat Pernyataan Pelantikan					
		- SK Pengangkatan dalam jabatan atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional					
		- SK Perpindahan Wilayah Kerja					
		- SK Perpindahan Antar Instansi					
		- SK Cuti di luar Tanggungan Negara (CLTN)					
		- Berita Acara Pemeriksaan					
		- SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS/ASN					
		- SK Perbantuan/Dipekerjakan di luar Instansi Induk					
		- SK Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan					
		- SK Pemberian Uang Tunggu					
		- SK Pembebasan dari Jabatan Organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara					
		- SK Pengalihan PNS					
		- SK Pemberhentian sebagai PNS/ASN					
		- SK Pemberhentian Sementara					
		- Surat Keterangan Pernyataan PNS/ASN Hilang					
		- Surat Keterangan Kembalinya PNS/ASN yang dinyatakan hilang					
		- SK Penggantian Nama					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
		- Surat perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran					
		- Surat Nikah/Cerai					
		- Akta Kelahiran					
		- Isian Formulir PUPNS					
		- Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Jabatan					
		- Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol					
		- Surat Keterangan Mutasi Keluarga					
		- Surat Keterangan Meninggal Dunia					
		- Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan					
		- Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional					
		- Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus					
		- Surat Pemberitahuan Kenaikkan Gaji Berkala					
		- Surat Tugas/ Izin Belajar Dalam/ Luar Negeri					
		- Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri					
		- Kartu Pendaftaran Ulang (Kardaf) PNS					
		- Ijazah/Sertifikat					
		- SK Penempatan/Penarikan Pegawai					
		- SK Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk					
		- Surat Pertimbangan Status PNS					
		- SK Pengaktifan Kembali Sebagai PNS					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
		- Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah					
		- SK Pensiun					
KP.15.02		b. Berkas Perseorangan Menteri/Pejabat Eselon I	Rahasia	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Sumber Daya Manusia
KP.15.03		c. Berkas Perseorangan ASN yang secara individual ditentukan oleh Kepala Badan yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional	Rahasia	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Sumber Daya Manusia

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
KP.15.04		d. Berkas Perseorangan Pegawai P3K/ Non ASN/ PPNPN	Rahasia	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Sumber Daya Manusia
		- Surat Lamaran,					
		- Ijazah, SKCK,					
		- Surat Keterangan Dokter,					
KU	VII	KEUANGAN					
KU.01	1	Perencanaan Pelaksanaan Anggaran					
KU.01.01		a. Rencana Anggaran Biaya	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
KU.01.02		b. Penggajian/ Penghasilan Pegawai	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
		- Daftar Gaji					
		- Daftar Tukin					
		- Daftar Uang Makan					
		- Daftar Lembur Pegawai					
KU.02	2	Pengeluaran Anggaran					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
KU.02.01		a. Belanja Barang Habis Pakai	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
KU.02.02		b. Belanja Barang Inventaris/Barang Modal	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
KU.02.03		c. Belanja Jasa	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
KU.03	3	Pengelolaan Perbendaharaan					
KU.03.01		a. Perbendaharaan	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
		- SK Pengangkatan KPA					
		- SK Pengangkatan PPK					
		- SK Pengangkatan Pejabat Penandatangan SPM					
		- SK Pengangkatan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran					
KU.03.02		b. Kartu Pengawasan Kredit Anggaran	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
KU.03.03		c. Pajak	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
		- Surat Setor Pajak (SSP)					
		- Nota Konfirmasi, dll.					
KU.03.04		d. Penerimaan Negara Bukan Pajak	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Keuangan dan Umum
KU.03.05		e. Pengembalian Belanja	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
		- SSPB					
		- SSBP					
KU.03.06		f. Pembukuan Anggaran	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
		- Buku Kas Umum					
		- Buku Kas Pembantu					
		- Kartu Realisasi Anggaran					
		- Kartu Pengawasan					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
KU.03.07		g. Rekening	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
		- Surat Permohonan persetujuan pembukaan rekening					
		- surat permohonan buka rekening ke bank					
		- Surat Pelaporan Pembukaan Rekening					
		- Agreement					
		- Penerbitan Nomor Register					
KU.04	4	Verifikasi Anggaran	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
KU.05	5	Akuntansi dan Pelaporan					
KU.05.01		a. Dokumen Akuntansi Keuangan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
		- Berita acara pemeriksaan kas					
		- Kas/Register Penutupan Kas					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
KU.05.02		b. Laporan Keuangan Tahunan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
		- Laporan Arus Kas					
		- Laporan Realisasi Anggaran					
		- Neraca					
		- Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)					
KU.05.03		c. Laporan Keuangan Semesteran	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
		- Laporan Arus Kas					
		- Laporan Realisasi Anggaran					
		- Neraca					
		- Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)					
KU.05.04		d. Laporan Keuangan Triwulanan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
		- Laporan Arus Kas					
		- Laporan Realisasi Anggaran					
		- Neraca					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
		- Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)					
KU.06	6	Ketatausahaan Keuangan					
KU.06.01		a. Keterangan Penghasilan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
KU.06.02		b. Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
KU.06.03		c. Pinjaman	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
KU.06.04		d. Tabungan Perumahan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
		- Administrasi Pendaftaran					
		- Penawaran Perumahan					
KU.06.05		e. Iuran Keanggotaan Organisasi	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
KU.07	7	Pendanaan Pinjaman Hibah Luar Negeri	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
		- Permohonan Pinjaman Luar Negeri (Blue Book)					
		- Dokumen kesanggupan negara donor untuk membiayai (Grey book)					
		- Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan Dokumen Sejenisnya					
		- Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri					
KU.08	8	Sistem Akuntansi Instansi					
KU.08.01		a. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
KU.08.02		b. Register Transaksi Harian (RTH):	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
		- Dokumen Sumber (DS)					
		- Surat Tanda Setoran (STS),					
		- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP),					
		- Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB),					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
		- Surat Perintah Membayar (SPM),					
KU.08.03		c. Laporan Realisasi SAI Bulanan/Triwulan/Semester	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
KU.09	9	Pertanggungjawaban Keuangan Negara					
KU.09.01		a. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
KU.09.02		b. Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal oleh Inspektorat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
KU.09.03		c. Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
		- LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)					
		- MHP (Memorandum Hasil Pemeriksaan)					
		- Tindak Lanjut/ Tanggapan LHP					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
KU.09.04		d. Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
		- Tuntutan Perbendaharaan/ TP					
		- Tuntutan Ganti Rugi/ TGR					
KU.09.05		e. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
OT	VIII	ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN					
OT.01	1	Organisasi					
OT.01.01		a. Struktur organisasi Kementerian PPN/Bappenas	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
		- Pembentukan					
		- Perubahan					
		- Pembubaran					
OT.01.02		b. Analisa/ Evaluasi Organisasi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
OT.02	2	Tata Laksana					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
OT.02.01		a. Sistem dan Prosedur Kerja Ketatalaksanaan (SOP)	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
		- Penyusunan dan Pengembangan Proses Bisnis					
		- Penyusunan dan Pengembangan SOP Administrasi Pemerintahan					
		- Monev SOP Administrasi Pemerintahan					
OT.02.02		b. Uraian jabatan dan tata kerja	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
OT.02.03		c. Standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
OT.02.04		d. Analisa Jabatan	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
		- Jabatan Struktural					
		- Jabatan Fungsional Tertentu					
		- Jabatan Fungsional Umum					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
OT.02.05		e. Analisa Beban Kerja	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
		- Jabatan Struktural					
		- Jabatan Fungsional Tertentu					
		- Jabatan Fungsional Umum					
OT.03	3	Reformasi Birokrasi	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
		- Tingkat Kementerian					
		- Unit Kerja Eselon I					
PA	IX	PENGAWASAN					
PA.01	1	Program Kerja pengawasan Tahunan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Inspektorat
		- Program Kerja					
		- Kertas Kerja Pengawasan					
PA.02	2	Pelaksanaan Pengawasan					
PA.02.01		a. Pengawasan Internal	Rahasia	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Inspektorat
		- Pengawasan lingkup kinerja kelembagaan					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
		- Pengawasan lingkup administrasi umum/keuangan					
		- Pengawasan lingkup kinerja kelembagaan dan administrasi keuangan/ umum (gabungan)					
		- Program kerja, kertas kerja, laporan hasil pengawasan					
		- Laporan Hasil Audit seperti Laporan hasil audit operasional, audit dana dekonsentrasi, audit kinerja dan lainnya					
		- Laporan Hasil Evaluasi dan Pemantauan seperti Evaluasi tingkat maturitas SPIP, evaluasi SAKIP, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)an Pemantauan dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi, dan lainnya					
		- Laporan Hasil Reviu/ Telaah seperti Reviu/ telaah RKA-K/L, reviu laporan kinerja, revisi RKA-K/L, Reviu laporan keuangan, Reviu RKBMN, Reviu usulan perubahan RKBMN penelaahan, Reviu pengendalian intern atas pelaporan keuangan, dan lainnya					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
PA.02.02		b. Pengawasan Eksternal	Rahasia	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Inspektorat
		- Laporan hasil audit (LHA), laporan hasil pemeriksaan (LHP), laporan hasil evaluasi (LHE), laporan akuntan (LA), laporan auditor independen (LAI), yang memerlukan tindak lanjut (TL)					
		- Laporan hasil audit investigasi (LHAI) yang mengandung tindak pidana korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut					
PA. 02.03		c. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu/ Khusus	Rahasia	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Inspektorat
PA. 02.04		d. Pengawasan ISO	Rahasia	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Inspektorat
PA.03	3	Pemantauan					
PA.03.01		a. Pemantauan Kegiatan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Inspektorat

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
		- Pemantauan Progress Pencapaian PKPT					
		- Penilaian Internal berupa penilaian mandiri secara berkala (telaah sejawat internal)					
		- Pemantauan Kinerja Pegawai melalui <i>Integrated Digital Workspace</i> dan <i>Smart Office</i> (IDW dan SO)					
PA.03.02		b. Pemantauan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi/ Kerugian Negara	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Inspektorat
		- Laporan Kehilangan, Laporan Penyelesaian Kerugian Negara					
		- SK Tim TGR					
		- Berita acara kehilangan barang/ uang,					
		- SK tanggungjawab Mutlak					
		- surat kesanggupan untuk mengganti ke kas negara					
		- SK Penghapusan barang, Laporan Penyelesaian TP/ TGR					
PA.03.03		c. Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Inspektorat

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
PA.03.04		d. Penerapan Early Warning Sistem	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Inspektorat
PA.04	4	Good Governance/ Zona Integritas/ WBK/ WBBM					
PA.04.01		a. Gratifikasi	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Inspektorat
		- Pelaporan gratifikasi dan data dukung					
		- SK gratifikasi					
		- Laporan gratifikasi					
PA.04.02		b. Whistle Blowing System (WBS)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Inspektorat
		- Pelaporan WBS					
		- Data Dukung					
		- SK WBS					
		- Laporan WBS					
PA.04.03		c. Pengaduan Masyarakat (SPAN Lapor/ Saber Pungli)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Inspektorat

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
		- SK Tim, Data Bukung, Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat (internal dan eksternal)					
PA.04.04		d. Benturan Kepentingan/ <i>Conflict of Interest (CoI)</i>	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Inspektorat
		- Peta Potensi adanya Benturan Kepentingan					
		- Tindaklanjut terhadap peta potensi					
		- SK Benturan Kepentingan					
		- Laporan Benturan Kepentingan					
PA.04.05		e. Pembangunan Zona Integritas	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Inspektorat
		- Data dukung implementasi pembangunan Zona Integritas					
		- Laporan evaluasi pembangunan Zona Integritas					
PA.04.06		f. Survei Penilaian Integritas	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Inspektorat
		- Formulir kerja sama SPI					
		- Pengumpulan data responden					
		- Pelaksanaan Survei					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
		- Laporan hasil survei					
PA.05	5	Kegiatan Pengawasan Lainnya					
PA.05.01		a. Edukasi/ Sosialisasi Pengawasan	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Inspektorat
PA.05.02		b. Bimbingan, Konsultasi dan Asistensi / Pendampingan Pengawasan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Inspektorat
		- laporan hasil asistensi/ pendampingan pengawasan					
		- Laporan hasil konsultasi					
PA.05.03		c. Pendidikan dan Pelatihan APIP	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Inspektorat
		- Materi Diklat					
		- Laporan diklat APIP					
		- Laporan Program Pelatihan Mandiri Semesteran					
PA.05.04		d. Keikutsertaan dalam Forum APIP	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Inspektorat

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
PA.05.05		e. Koordinasi dengan Pihak Eksternal	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Inspektorat
		- BPK					
		- BPKP					
		- APH dan Pihak Eksternal Lainnya					
PA.05.06		f. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Inspektorat
PA.05.07		g. Survei Kepuasan Stakeholder Inspektorat	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Inspektorat
		- Formulir survei					
		- Tabulasi hasil survei					
		- Laporan hasil survei					
PA.05.08		h. Telaah Sejawat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Inspektorat
		- Program kerja					
		- Kertas kerja					
		- Laporan Hasil Telaah Sejawat					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
PA.05.09		i. Kajian Pengawasan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Inspektorat
		- Draf kajian pengawasan					
		- Kajian pengawasan final					
PA.05.10		j. Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP (IACM)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Inspektorat
		- Kertas Kerja IACM					
		- Laporan Self Assesment IACM					
PL	X	PERLENGKAPAN					
PL.01	1	Rencana dan analisis Kebutuhan Barang					
PL.01.01		a. Rencana dan analisis Kebutuhan Barang Unit Kerja	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
		- Rencana Kebutuhan BMN, peralatan/mesin, barang persediaan, barang habis pakai dan lainnya.					
PL.01.02		b. Rencana dan analisis Kebutuhan Barang Kementerian	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
		- Usulan Dokumen KAK dan Owner Estimate (OE)/RAB berupa pengadaan peralatan/mesin, pengadaan alat pengolah data, pengadaan meubelair, pengadaan barang persediaan dan pengadaan barang habis pakai lainnya.					
PL.02	2	Pengadaan Barang					
PL.02.01		a. Langsung	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
PL.02.02		b. Penunjukan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
PL.02.03		c. Lelang termasuk Telaah Pelaksanaan Lelang	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
PL.03	3	Pengadaan Barang Melalui Hibah/Bantuan/Tukar Menukar/Pinjaman dan Sewa	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
PL.04	4	Penyimpanan dan Distribusi Barang					
PL.04.01		a. Penyimpanan Persediaan Barang	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
		- Surat Bukti Barang Masuk					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
		- Surat Jalan					
PL.04.02		b. Pendistribusian	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
		- Surat Bukti Pengeluaran Barang					
PL.05	5	Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)					
PL.05.01		a. Pembukuan BMN	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
		- Daftar Barang Kuasa/ Pengguna					
		- Kartu Identitas Barang					
		- Buku Penerimaan PNB					
PL.05.02		b. Inventarisasi BMN	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
		- Keputusan Pembentukan Tim					
		- Rencana Kerja Pelaksanaan Inventarisasi					
		- Kertas Kerja Inventarisasi					
		- Berita Acara Inventarisasi					
		- Daftar Inventris/Buku Barang/Daftar Barang Lainnya					
		- Laporan Hasil Inventarisasi					
		- Laporan Opname Fisik Barang Inventaris (LOFBI)					
		- Kartu Inventaris Ruangan (KIR)					
		- Kartu Inventaris Barang (KIB)					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
		- Kartu Inventaris Laporan (KIL)					
		- Laporan Mutasi Barang Triwulanan (LMBT)					
		- Laporan Triwulan Inventaris (LTI)					
		- Buku Inventaris					
PL.05.03		c. Laporan BMN	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
		- Laporan Kondisi Barang					
		- Laporan Barang Kuasa Pengguna					
		- Berita Acara Rekonsiliasi Eksternal dan Internal					
		- Laporan Persediaan Habis Pakai					
		- Laporan Persediaan Tidak Habis Pakai					
PL.05.04		d. Tanah	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
		- Pengurusan sertifikat baru					
		- Penggantian sertifikat hilang					
		- Pemecahan sertifikat induk					
		- Balik nama					
PL.06	6	Pemanfaatan BMN					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
PL.06.01		a. Penghunian Rumah Negara	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
		- Surat Ijin Penghuniaan					
		- Berita Acara Serah Terima Kunci					
		- Teguran kepada Penghuni Rumah Negara					
		- Permasalahan Penghunian Rumah Negara					
PL.06.02		b. Penggunaan BMN	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
		- Usulan Proses Persetujuan BMN					
		- Keputusan Penggunaan BMN					
		- Rekapitulasi Data Penggunaan BMN					
PL.06.03		c. Pendayagunaan BMN	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
		- Usulan Proses Persetujuan Pemanfaatan BMN (Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan dan Bangun Serah Guna/ Bangun Guna Serah)					
		- Rekapitulasi Data Penerimaan PNBP dari Pemanfaatan BMN					
		- Hibah BMN					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
PL.07	7	Pengawasan dan Pengendalian BMN					
PL.07.01		a. Pengawasan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
		- Laporan Penelitian Administrasi BMN					
		- Laporan Penelitian Lapangan					
PL.07.02		b. Pengendalian	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
		- Surat Tindak Lanjut Hasil Pemantauan					
		- Surat Permintaan Penerbitan BMN dari Pengelola Barang					
PL.07.03		c. Bukti Kepemilikan Aset	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
		- Sertifikat Tanah					
		- Izin Mendirikan Bangunan (IMB)					
		- Pajak Bumi dan Bangunan					
		- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)					
		- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
		- Denah/gambar teknik bangunan					
		- Denah Instalasi listrik/saluran air dan gas/jaringan internet					
PL.08	8	Penghapusan BMN	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
		- Surat Keputusan Penghapusan BMN					
		- Berita Acara Penghapusan BMN					
PR	XI	PERENCANAAN					
PR.01	1	Pokok-pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan					
PR.01.01		a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Master Plan (RPJP)	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
PR.01.02		b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
PR.01.03		c. Rencana Strategis	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
		- Renstra Kementerian					
		- Renstra Unit Kerja Eselon I					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
PR.01.04		d. Fasilitasi Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
PR.02	2	Program Kerja Tahunan					
PR.02.01		a. Usulan Unit Kerja beserta data pendukung	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
PR.02.02		b. Usulan Kementerian PPN/Bappenas	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
PR.02.03		c. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bappenas	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
PR.02.04		d. Rencana Kerja berdasarkan Pagu Indikatif (Renja Bappenas)	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
PR.02.05		e. Inisiatif Baru / New Inisiatif Bappenas	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
PR.03	3	Penetapan/Kontrak Kinerja					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
PR.03.01		a. Menteri PPN/Kepala Bappenas	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
PR.03.02		b. Pimpinan Unit kerja	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
PR.04	4	Indikator Kinerja Utama					
PR.03.01		a. Menteri PPN/Kepala Bappenas	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
PR.03.02		b. Pimpinan Unit kerja	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
PR.05	5	Rencana Aksi	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
PR.06	6	Perencanaan Anggaran					
PR.06.01		a. Penyusunan Rencana Anggaran (RKAKL, DIPA, POK)	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
PR.06.02		b. Perencanaan PNPB	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
PR.06.03		c. Dana Dekonsentrasi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
		- Koordinasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi					
PR.06.04		d. Standarisasi Harga Satuan Perencana Barang	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
PR.06.05		e. Standar Biaya Keluaran	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
PR.07	7	Revisi Anggaran					
PR.07.01		a. Revisi DIPA dan POK	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
PR.07.02		b. Anggaran Biaya Tambahan	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
PR.07.03		c. APBN Perubahan	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
PR.08	8	Laporan					
PR.08.01		a. Laporan Bulanan Unit Kerja	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
PR.08.02		b. Laporan Triwulan Unit Kerja	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
PR.08.03		c. Laporan Semesteran Unit Kerja	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
PR.08.04		d. Laporan Tahunan Unit Kerja	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
PR.08.05		e. Laporan Tahunan Kementerian PPN/ Bappenas	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
PR.08.06		f. Laporan Insidental	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
		- Laporan Pemantauan Prioritas					
		- Laporan pelaksanaan atas permintaan eksternal					
		- Laporan pelaksanaan kegiatan/program tertentu					
PR.06.07		g. Laporan Khusus	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
PR.06.08		h. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIN) Pemerintah (LAKIP)/Laporan Kinerja (LKj)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
		- LAKIP/LKj Unit kerja					
		- LAKIP/LKj Kementerian PPN/Bappenas					
PR.09	9	Monitoring Program	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
		- Laporan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran					
		- Laporan Monitoring Pelaksanaan Barang dan Jasa					
PR.10	10	Evaluasi Program					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
PR.10.01		a. Evaluasi Program Unit kerja	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
		- Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Unit Kerja					
		- Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN)					
		- Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas					
PR.10.02		b. Evaluasi Program Kementerian PPN/Bappenas	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
PS	XII	PERPUSTAKAAN					
PS.01	1	Penyimpanan Deposit Bahan Pustaka					
PS.01.01		a. Penerimaan Koleksi Bahan Pustaka Deposit	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
		- Bukti Penerimaan Koleksi Bahan Pustaka Deposit					
PS.01.02		b. Bukti Penyerahan Karya Cetak/ Karya Rekam Bahan Pustaka	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
		- Bukti Penerimaan Koleksi Bahan Pustaka Deposit					
PS.01.03		c. Pengelolaan Deposit Bahan Pustaka	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
PS.02	2	Pengadaan Bahan Pustaka					
PS.02.01		a. Seleksi Bahan Pustaka	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
PS.02.02		b. Pemesanan Bahan Pustaka	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
		- Daftar buku dalam pemesanan					
PS.02.03		c. Penerimaan Bahan Pustaka	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
PS.03	3	Pengolahan Bahan Pustaka					
PS.03.01		a. Inventarisasi Bahan Pustaka	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
		- Buku induk koleksi					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
PS.03.02		b. Pengelolaan Bahan Pustaka Surplus	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
PS.04	4	Layanan Bahan Pustaka dan Informasi					
PS.04.01		a. Layanan Peminjaman dan Pengembalian	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
PS.04.02		b. Layanan Pembuatan e-Kliping	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
PS.04.03		c. Layanan Penelusuran Informasi	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
PS.04.04		d. Data dan statistik anggota, pengunjung dan peminjaman bahan pustaka	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
PS.05	5	Pemeliharaan Bahan Pustaka	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
		- Survei kondisi bahan pustaka					
		- Reprografi bahan pustaka					
		- Fumigasi bahan pustaka					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
RT	XIII	KERUMAHTANGGAAN DAN KETATAUSAHAAN					
RT.01	1	Pengurusan Penggunaan Sarana Telekomunikasi	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
RT.02	2	Perjalanan dinas	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
		- Dalam negeri					
		- Luar negeri					
RT.03	3	Pengurusan Penggunaan Fasilitas Kantor	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
RT.04	4	Administrasi penyediaan konsumsi dan akomodasi	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
		- Rapat Pimpinan (Menteri PPN/Kepala Bappenas)					
		- Rapat staf					
RT.05	5	Kendaraan dinas	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
		- pengurusan surat-surat kendaraan dinas					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
		- pemeliharaan dan perbaikan					
		- pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan					
RT.06	6	Pemeliharaan gedung dan taman	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
		- pertamanan/landscaping					
		- penghijauan					
		- perbaikan gedung					
		- perbaikan rumah dinas/wisma					
		- kebersihan gedung dan taman					
RT.07	7	Pengelolaan jaringan listrik, air, telpon dan komputer	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
		- perbaikan/pemeliharaan					
		- pemasangan					
RT.08	8	Ketertiban dan keamanan					
RT.08.01		a. Pengamanan, penjagaan dan pengawalan terhadap pejabat, kantor, dan rumah dinas	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
		- Daftar nama satuan pengamanan					
		- Daftar jaga/daftar piket					
		- Catatan gangguan/pelanggaran/kejadian					

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
		- Surat ijin keluar masuk orang atau barang					
RT.08.02		b. Laporan ketertiban dan keamanan	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
		- Kehilangan					
		- Kerusakan					
		- Kecelakaan					
		- Gangguan					
RT.09	9	Administrasi pengelolaan parkir	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
RT.10	10	Administrasi pakaian dinas pegawai, satpam, petugas kebersihan, dan pegawai lainnya	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Umum
		- Undangan rapat					
		- Materi rapat					
		- Daftar hadir					
		- Notulensi/risalah					
RT.11	11	Penyelenggaraan Rapat					
RT.11.01		a. Rapat Pimpinan	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan

KODE	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
RT.11.02		b. Rapat Staf	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administratif, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan

B. SUBSTANTIF

KODE KLASIFIKASI	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
PP	I	PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL					
PP.01	1	Penyiapan Rumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bapenas	Pusat Analisis Kebijakan Kinerja
		- Penyiapan Bahan					
		- Pembahasan/ Ekspose/ Hearing DPR					
		- Rekomendasi Rancangan Kebijakan					
		- Penetapan Rancangan Peraturan Perundang-undangan					
PP.02	2	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)					
PP.02.01		a. Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bapenas	Direktorat dibawah semua ke deputian kecuali Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan dan Deputi Bidang Pemantauan Evaluasi & Pengendalian Pembangunan

KODE KLASIFIKASI	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
		- Ide/gagasan visioner penyelenggara negara dan/atau masyarakat					
		- Hasil Evaluasi pelaksanaan pembangunan sebelumnya					
		- Rancangan Awal RPJPN					
PP.02.02		b. Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN / Bappenas	Direktorat dibawah semua ke deputian kecuali Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan dan Deputi Bidang Pemantauan Evaluasi & Pengendalian Pembangunan
		- Laporan Sosialisasi Rancangan awal					
		- Laporan hasil konsultasi Publik,					
		- Hasil Penyaringan aspirasi masyarakat,					
		- Surat Tugas					
		- SK Tim					
		- Bahan-bahan Musrenbang RPJPN					
		- Laporan Musrenbang Jangka Panjang nasional					
PP.02.03		c. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama,	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Direktorat dibawah semua

KODE KLASIFIKASI	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
				Pengawas Internal		pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bapenas	kedeputian kecuali Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan dan Deputi Bidang Pemantauan Evaluasi & Pengendalian Pembangunan
		- Surat Penyampaian Menteri kepada Presiden					
		- Rancangan Akhir RPJPN					
		- Draf Rancangan Undang-Undang RPJPN					
PP.03	3	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)					
PP.03.01		a. Rancangan Awal RPJMN	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bapenas	Direktorat dibawah semua kedeputian kecuali Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan dan Deputi Bidang Pemantauan Evaluasi & Pengendalian Pembangunan
		- RPJMN yang sedang berjalan					

KODE KLASIFIKASI	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
		- Rancangan Rencana pembangunan secara Teknokratik					
		- Visi, misi dan program prioritas Presiden					
		- Rancangan Awal RPJMN					
PP.03.02		b. Rancangan Renstra Kementerian/Lembaga	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bapenas	Direktorat dibawah semua ke deputian
		- Rancangan Rencana Strategis Kementerian Lembaga					
		- Kesepakatan Bilateral Meeting Pembahasan Rancangan renstra kementerian/lembaga					
		- Persetujuan Tertulis Deputi Mitra Kerja K/L atas Penelaahan Rancangan Renstra					

KODE KLASIFIKASI	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
PP.03.03		c. Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bapenas	Direktorat dibawah semua ke deputian kecuali Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan dan Deputi Bidang Pemantauan Evaluasi & Pengendalian Pembangunan
		- Laporan sosialisasi Rancangan Awal					
		- Laporan Hasil konsultasi Publik					
		- Hasil Penyaringan aspirasi masyarakat					
		- Bahan Musrenbang RPJMN					
		- Laporan hasil musrenbang RPJMN					
PP.03.04		d. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bapenas	Direktorat dibawah semua ke deputian kecuali Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan dan Deputi Bidang Pemantauan Evaluasi & Pengendalian Pembangunan

KODE KLASIFIKASI	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
		- Rancangan akhir RPJMN					
		- Risalah Sidang Kabinet					
PP.03.05		e. Perubahan Renstra Kementerian lembaga	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bapenas	Direktorat dibawah semua ke deputian
		- Usulan Kementerian Lembaga					
		- Bilateral Meeting					
		- Kesepakatan Bilateral Meeting					
PP.04	4	Rencana Pembangunan Tahunan Nasional/ Rencana Kerja Pemerintah (RKP)					
PP.04.01		a. Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bapenas	Direktorat dibawah semua ke deputian
		- Laporan hasil rapat RKP					
		- Daftar hadir					
		- Agenda rapat					
		- Undangan					
		- Bahan Paparan					
		- Dokumentasi					
		- Notulensi					

KODE KLASIFIKASI	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
		- Surat Menteri kepada Wapres, Menko, Menkeu					
		- Surat Edaran Menteri kepada K/L					
		- Pedoman Penyusunan RKP					
		- SK Tim Penyusun RKP					
PP.04.02		b. Rancangan Awal RKP	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bapenas	Direktorat dibawah semua ke deputian
		- Surat Edaran Bersama Menteri dan Menteri Keuangan					
		- Hasil Rancangan Awal RKP					
PP.04.03		c. Pagu Indikatif Kementerian Lembaga	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bapenas	Direktorat pada Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan
		- Rancangan Pagu Indikatif					
		- Surat Bersama Menteri PPN dan Menteri Keuangan					

KODE KLASIFIKASI	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
PP.04.04		d. Rancangan Renja Kementerian/Lembaga	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bapenas	Direktorat dibawah semua ke deputian
		- Salinan Matriks Racangan Awal Renja					
		- Salinan Matriks Rancangan Renja kementerian/ lembaga yang dimutakhirkan berdasarkan Pagu Indikatif					
		- Salinan Matriks Rancangan Renja kementerian/ lembaga yang dimutakhirkan berdasarkan Pagu Anggaran					
		- <i>Bilateral Meeting</i>					
		- <i>Trilateral Meeting</i>					
PP.04.05		e. Penyusunan Permen Rancangan RKP	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bapenas	Direktorat dibawah semua ke deputian
		- Permen Rancangan RKP					

KODE KLASIFIKASI	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
PP.04.06		f. Rapat Koordinasi Terbatas Pembangunan Pusat (Rakorbangpus)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bapenas	Direktorat dibawah semua ke deputian
		- Surat Tugas					
		- Daftar hadir					
		- Notulensi					
		- Laporan Hasil Rakorbangpus.					
PP.04.07		g. Musyawarah Rencana Terbatas Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) Penyusunan RKP	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrasi, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bapenas	Direktorat dibawah semua ke deputian
		- Laporan hasil Musrenbangprov					
PP.04.08		h. Konsultasi Publik	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrasi, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bapenas	Direktorat dibawah semua ke deputian
		- Surat Tugas					

KODE KLASIFIKASI	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
		- Notulensi					
		- Laporan hasil konsultasi publik					
PP.04.09		i. Musrenbang Nasional RKP	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrasi, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bapenas	Direktorat dibawah semua ke deputian
		- Surat Tugas					
		- Daftar hadir					
		- Notulensi					
		- Laporan Hasil MusrenbangNas RKP					
PP.04.10		j. Penyusunan Perpres RKP	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bapenas	Direktorat dibawah semua ke deputian
		- Laporan Panja RKP dan Prioritas Anggaran RAPBN					
		- Perpres RKP					

KODE KLASIFIKASI	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
PP.04.11		k. Pemutakhiran RKP	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrasi, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bapenas	Direktorat dibawah semua ke deputian
		- Dokumen Akhir RKP					
PP.04.12		l. Pagu Anggaran Kementerian Lembaga	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bapenas	Direktorat pada Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan
		- Rancangan Pagu Anggaran Kementerian Lembaga					
		- Surat Bersama Menteri PPN dan Menteri Keuangan					
PP.04.13		m. Perubahan Renja Kementerian Lembaga	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bapenas	Direktorat dibawah semua ke deputian

KODE KLASIFIKASI	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
		- Trilateral Meeting					
		- Salinan Matriks Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga					
		- Penyampaian Usulan Perubahan Renja Kementerian Lembaga					
PP.05	5	Penyusunan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI					
PP.05.01		a. Persiapan Penyusunan Lampiran Pidato	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bapenas	Direktorat dibawah semua ke deputian
		- SK Tim Pelaksana Penyusunan Lampiran Pidato					
PP.05.02		b. Penyusunan Draf Awal Lampiran Pidato	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bapenas	Direktorat dibawah semua ke deputian
		- Petunjuk Teknis Penyusunan Lampiran Pidato					
		- Surat Menteri ke K/L					
		- Draf Awal Lampiran Pidato					

KODE KLASIFIKASI	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
PP. 05.03		c. Penyusunan Draf Final Lampiran Pidato	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bapenas	Direktorat dibawah semua ke deputian
		- Draf Final Lampiran Pidato					
PP.05.04		d. Finalisasi Dokumen Lampiran Pidato	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrasi, Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bapenas	Direktorat dibawah semua ke deputian
		- Dokumen Lampiran Pidato					
PP.06	6	Aksi Strategis Nasional (Issue Strategic)					
PP.06.01		a. Rancangan Awal Aksi Strategis Nasional	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bapenas	Direktorat dibawah semua ke deputian
		- Rancangan awal aksi strategis nasional					
		- Laporan Hasil sosialisasi Rencana Aksi Nasional					

KODE KLASIFIKASI	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
		- Rapat pembahasan rancangan Awal denga K/L					
		- Meeting dengan kementerian/lembaga					
		- Bahan-bahan koordinasi/sinkronisasi/FGD/konsinyering,					
PP.06.02		b. Rancangan Akhir Aksi Strategis Nasional	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/ Bappenas	Direktorat dibawah semua kedeputian
		- Surat Penyampaian Menteri kepada Presiden					
		- Rancangan Akhir Perencanaan Aksi Strategis Nasional					
PP.07	7	Konsultasi Perencanaan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/ Bappenas	Direktorat dibawah semua kedeputian
		a. Konsultasi Triwulan					
		- Surat Tugas					

KODE KLASIFIKASI	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
		- Notulensi					
		- Laporan Hasil konsultasi					
		b. Konsultasi Insidentil					
		- Surat Tugas					
		- Notulensi					
		- Laporan Hasil konsultasi					
		c. Laporan Tahunan Konsultasi perencanaan pembangunan					
PP.08	8	Koordinasi dan Sinkronisasi					
PP.08.01		a. Koodinasi dan Sinkronisasi Berkala	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/ Bappenas	Direktorat dibawah semua ke deputian
		- Surat Tugas					
		- SK Tim					
		- Bahan-bahan koordinasi/ sinkronisasi/FGD/konsinyering,					
		- Laporan Hasil Koordinasi/ Sinkronisasi/ FGD/ konsinyering					

KODE KLASIFIKASI	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
PP.08.02		b. Koordinasi dan sinkronisasi insidentil	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/ Bappenas	Direktorat dibawah semua ke deputian
		- Hasil Koordiasi dan Sinskronisasi					
		- Laporan Koordiasi dan Sinskronisasi					
PD	II	PERENCANAAN PENDANAAN PEMBANGUNAN					
PD.01	1	Rancangan Pendanaan Pinjaman					
PD.01.01		a. Pendanaan Pinjaman Luar Negeri	Rahasia	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum termasuk dampak ekonomi makro	Direktorat pada Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan
		- Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri (RPPLN)					
		- Usul Kegiatan Pinjaman Luar Negeri dari Kementerian/Lembaga/pemerintah daerah					
		- Usul Kegiatan Pinjaman Khusus (ditolak)					
		- DRPLN-JM (Blue Book)					

KODE KLASIFIKASI	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
		- DRPPLN (Green Book)					
		- DRPLN Khusus (Green Book Khusus)					
		- Daftar Kegiatan					
		- Daftar Kegiatan Khusus					
PD.01.02		b. Pendanaan Pinjaman Dalam negeri	Rahasia	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Termasuk informasi dengan kategori dikecualikan sesuai Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat pada Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan
		- Daftar Kegiatan Pendanaan Dalam Negeri (DKPDN)					
		- Daftar Kegiatan Pendanaan Pinjaman Dalam Negeri (DKPPDN)					
PD.02	2	Rancangan Pendanaan Hibah					
PD.02.01		a. Rancangan Pendanaan Hibah Luar Negeri	Rahasia	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum termasuk dampak ekonomi makro	Direktorat pada Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan

KODE KLASIFIKASI	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
		- Usulan Kegiatan Hibah Kementerian/Lembaga/BUMN/ Pemerintah/Daerah					
		- Daftar rencana kegiatan hibah Luar Negeri					
PD.02.02		b. Rancangan Pendanaan Hibah Dalam Negeri	Rahasia	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum termasuk dampak ekonomi makro	Direktorat pada Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan
PD.03	3	Rancangan Pendanaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri	Rahasia	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum termasuk dampak ekonomi makro	Direktorat pada Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan
		- Usulan Kegiatan pendanaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri					
		- Daftar Rancangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (DRPHLN)					
PD.04	4	Kerja Sama Pendanaan Pembangunan Internasional					

KODE KLASIFIKASI	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
PD.04.01		a. Kerjasama Pendanaan Pembangunan Multilateral	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/ Bappenas	Direktorat pada Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Khususnya Dit Kerjasama Pendanaan Multilateral
		- Daftar Kegiatan Kerjasama Pendanaan pembangunan Internasional (DKPKPI) Multilateral					
PD.04.02		b. Kerjasama Pendanaan Pembangunan Bilateral	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/ Bappenas	Direktorat pada Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Khususnya Dit Kerjasama Pendanaan Bilateral
		- Dokumen usulan Kerja Sama Pembangunan Bilateral seperti Country Strategy dan sejenisnya;					
		- Minutes of Meeting (MoM) Bilateral Meeting dengan Mitra Pembangunan;					
		- Dokumen Daftar Kegiatan proyek;					
		- Dokumen penilaian kesiapan kegiatan proyek PHLN					
		- Dokumen Pre-request kegiatan yang dibiayai PHLN;					

KODE KLASIFIKASI	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
		- Dokumen Rekomendasi Pinjaman Komersial luar negeri BUMN;					
		- Dokumen terkait pemantauan lapangan proyek-proyek yang dibiayai PHLN Bilateral					
		- Dokumen lain terkait Kerja Sama Pendanaan Bilateral					
PD.05	5	Pendanaan melalui Surat Berharga Syariah Negara	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/ Bappenas	Direktorat pada Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan
		- Usulan Kegiatan					
		- Surat Penyampaian Daftar Prioritas Proyek kepada Menteri Keuangan dan Pemrakarsa Proyek					
		- Daftar Prioritas Proyek SBSN					
PD.06	6	Inisiatif Baru / New Initiatif					
PD.06.01		a. Usulan Pendanaan Inisiatif Baru	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/ Bappenas	Direktorat dibawah semua ke deputian

KODE KLASIFIKASI	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
		- Rencana pendanaan on toP dan/ atau inisiatif baru					
		- Realokasi pendanaan on top dan/ atau inisiatif baru					
		- Daftar kegiatan prioritas yang dibiayai Pendanaan Inisiatif Baru					
PD.06.02		b. Rancangan Inisiatif Baru	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/ Bappenas	Direktorat dibawah semua ke deputian
		- Hasil Rapat pembahasan usulan					
		- Draft final rancangan Inisiatif Baru					
PD.06.03		c. Penetapan Inisiatif baru	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/ Bappenas	Direktorat dibawah semua ke deputian
ME	III	MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN					
ME.01	1	Pemantauan pelaksanaan perencanaan pembangunan					

KODE KLASIFIKASI	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
ME.01.01		a. Penyiapan Pemantauan Laporan Triwulanan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/ Bappenas	Direktorat Mitra KL dibawah semua Kedeputian, Direktorat pada Deputi Bidang PEPP, Direktorat terkait PHLN pada Deputi Bidang Pendanaan pembangunan
		- Surat Tugas					
		- Surat Menteri kepada K/L/Pemda/BUMN					
		- Laporan triwulan kementerian / lembaga					
ME.01.02		b. Analisis Laporan Triwulanan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/ Bappenas	Direktorat Mitra KL dibawah semua Kedeputian, Direktorat pada Deputi Bidang PEPP, Direktorat terkait PHLN pada Deputi Bidang Pendanaan pembangunan

KODE KLASIFIKASI	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
		- Analisis Laporan triwulan kementerian / lembaga					
		- Rekomendasi Analisis Laporan Triwulanan					
		- Analisis Laporan Proyek Pendanaan Bersumber dari Luar Negeri					
ME.01.03		c. Analisis Laporan Tematik	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/ Bappenas	Direktorat Mitra KL dibawah semua Kedeputian, Direktorat pada Deputi Bidang PEPP,
		- Analisis Laporan Tematik					
		- Analisis Laporan tematik tertentu					
		- Analisis Laporan tematik khusus					
ME.02	2	Evaluasi					
ME.02.01		a. Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/ Bappenas	Direktorat Mitra KL dibawah semua Kedeputian, Direktorat pada Deputi Bidang PEPP,
		- Laporan evaluasi rencana kerja kementerian/ lembaga					

KODE KLASIFIKASI	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
		- Laporan evaluasi kinerja pelaksanaan RKP					
		- Laporan evaluasi renja kementerian/lembaga tertentu					
		- Laporan evaluasi renja kementerian/lembaga khusus					
ME.02.02		b. Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/ Bappenas	Direktorat Mitra KL dibawah semua Kedeputian, Direktorat pada Deputi Bidang PEPP,
		- Laporan evaluasi rencana strategis kementerian/lembaga					
		- Laporan hasil evaluasi RPJMN					
ME.02.03		c. Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/ Bappenas	Direktorat Mitra KL dibawah semua Kedeputian, Direktorat pada Deputi Bidang PEPP,
		- Laporan hasil evaluasi RPJPN					

KODE KLASIFIKASI	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
ME.02.04		d. Evaluasi Pendanaan Pinjaman LN dan Hibahm, SBSN atau sumber pendanaan lainnya	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum termasuk dampak ekonomi makro	Direktorat Mitra KL dibawah semua Kedeputian, Direktorat pada Deputi Bidang PEPP, Direktorat pada Deputi Bidang Pendanaan pembangunan
		- Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN					
		- Laporan Evaluasi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD					
		- Laporan Hasil Evaluasi					
ME.02.05		e. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/ Bappenas	Direktorat dibawah Kedeputian Bidang Pengembangan Regional dan Direktorat pada Deputi Bidang PEPP,
		- Laporan evaluasi Provinsi					
		- Laporan hasil evaluasi					

KODE KLASIFIKASI	NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT
ME.02.06		f. Evaluasi Tematik	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/ Bappenas	Direktorat Mitra KL dibawah semua Kedeputian, Direktorat pada Deputi Bidang PEPP,
		- Laporan Evaluasi Tematik					

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati